Bandar Maulana
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 29, No. 2, Oktober 2024
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

DINAMIKA PABRIK GULA MADUKISMO 1955-1991: KAJIAN SOSIAL-EKONOMI

Yohanes Leonardus Krismawan Anugrah Putra

Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
Gedung Sekolah Pascasarjana UGM, JL. Teknika Utara, Pogung, Sleman, 55284, Yogyakarta
Email: leoyohanes27@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas dinamika Pabrik Gula Madukismo dalam kurun waktu 1955 sampai 1991. Pabrik Gula Madukismo sebagai kawasan industri penggerak perekonomian masyarakat membawa berbagai perubahan sosial bagi lingkungan di sekitarnya. Masa Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) memperlihatkan sejauh mana pengaruh pabrik gula Madukismo terhadap masyarakat. Bukan hanya di dalam pabrik, daerah pedesaan pada periode tersebut menjadi bagian dari lingkungan industrial pabrik. Dalam hal ini masyarakat berperan sebagai petani, serta bergerak dalam ikatan kelompok tani yang disatukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Sinergitas masyarakat dengan pihak pabrik gula menjadi bagian penting bagi pabrik gula Madukismo dapat bertahan dalam perkembangan masa TRI. Dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar disertai pula oleh dampak negatif yaitu tumbuhnya penyakit sosial di tengah masyarakat, yaitu pencurian, korupsi dan premanisme.

Kata Kunci: *Pabrik Gula Madukismo, Petani, Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), Koperasi Unit Desa (KUD, dampak*

ABSTRACT

This paper discusses the dynamics of the Madukismo Sugar Factory in the period 1955 to 1991. The Madukismo Sugar Factory as an industrial area driving the community's economy, brought various social changes to its surrounding environment. The People's Sugarcane Intensification (TRI) period reveals the extent of the sugar factory's influence on the community. Not only in the factory, rural areas during that period became part of the factory's industrial environment. During this time, local residents primarily worked as farmers, and organized within the Koperasi Unit Desa or KUD. The synergy between the community and the sugar factory became an important part of the Madukismo sugar factory to survive during the TRI period. The impact received by the surrounding community was also accompanied by negative impacts. These included the emergence of social problems such as theft, corruption, and the rise of local criminal elements.

Keywords: *Madukismo sugar factory, farmers, Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), Village Unit Cooperative* (KUD), *impact*

PENDAHULUAN

Gula merupakan produk dari olahan tebu sebagai bahan baku utamanya. Di Pulau Jawa sendiri, tebu mulai dikenal pada sekitar abad 400 SM (Mubyarto dan Daryanti, 1991: 7). Pada masa tersebut, tebu baru sebatas menjadi barang konsumsi kasar, yang langsung dikunyah untuk mengeluarkan nira nya. Baru pada abad 15 M, mulai dikenal sistem produksi gula, namun masih dengan cara tradisional. Tebu digiling menggunakan tenaga kerbau untuk diambil sari-sari nya yang kemudian akan diproduksi menjadi gula.

Masuknya VOC pada abad 17 M mengawali perkembangan industri gula di pulau Jawa, Gubernur Jenderal Van Diemen memberi izin produksi gula pada wilayah Batavia dan Banten. Sementara itu, produksi gula di Yogyakarta baru berkembang pada abad 19. Sewa tanah menjadi sistem penggunaan lahan pada masa tersebut, dimana tanah priyayi disewa oleh pihak Belanda maupun Cina sebagai penyewa lahan. Kemajuan industri di Jawa membuat perkembangan gula tidak kalah kencang dari tanaman lainnya. Pada tahun 1840, industri gula telah mencapai angka 77% dari keseluruhan nilai ekspor (Hermanu, 2019: 13)

Oleh kasultanan Yogyakarta, tanah diberikan kepada kaum birokrat maupun keluarga kerajaa, yang kemudian akan disewakan kepada para pemimpin desa. Lahan yang juga disebut sebagai tanah *lungguh* tersebut memberi keuntungan bagi pemilik tanah, dengan pembagian hasil sebesar 2/5 (1/5 diberikan kepada pamong desa dan sisanya kepada buruh tani). Status kepemilikan tanah berubah semenjak adanya ptogram Sistem Tanam Paksa. Tanah kerajaan disewakan kepada pihak swasta. Penyewa juga diberi hak istimewa untuk dapat memberlakukan kerja paksa serta memungut pajak dari masyarakat.

Pada tahun 1928, pasca dihapusnya tanam paksa terbit peraturan *Vorstenlandsche Grandhuur Reglement* (VGR), yang mana memberi hak pemakaian tanah maksimal 50 tahun. Hal tersebut memicu berkembangnya industri gula di Yogyakarta. Pada abad XX, sudah berdiri sejumlah 19 pabrik gula yang dimiliki swasta asing di Yogyakarta. Kesembilan belas pabrik gula tersebut adalah Pabrik Gula Bantul, Pabrik Gula Barongan, Pabrik Gula Beran, Pabrik Gula Demakijo, Pabrik Gula Gesikan, Pabrik Gula Gondanglipuro, Pabrik Gula Kedaton Plered, Pabrik Gula Klaci, Pabrik Gula Medari, Pabrik Gula Padokan, Pabrik Gula Pundong, Pabrik Gula Randugunting, Pabrik Gula Rewulu, Pabrik Gula Sedayu, Pabrik Gula Sendangpitu, Pabrik Gula Sewugalur, Pabrik Gula Tanjungtirto, Pabrik Gula Cebongan, dan Pabrik Gula Wonocatur. Semua Pabrik Gula tersebut mayoritas berada di kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman. Krisis Malaise pada 1933-1936 memaksa sebanyak sembilan pabrik gula dinon-aktifkan, sehingga hanya tersisa sepuluh pabrik gula saja.

Masa revolusi fisik pada 1948 menjadi akhir dari seluruh pabrik gula di Yogyakarta. Dengan siasat "bumi hangus", berbagai bangunan pabrik tersebut dihancurkan, dan hanya tersisa tanah saja yang di atasnya kemudian didirikan bangunan lain. Seperti tanah dari pabrik gula Sedayu yang kemudian dibangun sebuah perkampungan dan tanah pabrik gula Pundong dengan pendirian sebuah gedung perkantoran, sedangkan tanah pabrik gula Padokan yang pada 1955 kemudian didirikan Pabrik Gula Madukismo.

Penulisan ini mengacu pada teori perubahan sosial yang berasal dari pemikiran Talcott Parson. Dinamika sosial yang berlangsung di tengah lingkungan masyarakat terjadi secara dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Keberlanjutan tersebut didorong oleh peranan dari faktor eksternal, dalam kasus ini ialah sebuah industri manufaktur, yang memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Karena itu, keberadaan

industri bukan merupakan elemen yang terpisah dari masyarakat, melainkan sebuah sistem sosial secara keseluruhan.

Pabrik gula yang berperan sebagai penggerak "roda" perputaran ekonomi masyarakat turut melahirkan berbagai perubahan sosial di lingkungan sekitarnya. Dalam segi negatif, gejala sosial tersebut nampak dalam bentuk penyakit sosial, diantaranya pencurian, korupsi dan premanisme. Sedangkan dalam hal positif ialah posisi pabrik gula sebagai lapangan kerja, yang secara luas memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraannya, baik sebagai petani, sopir truk, maupun karyawan pabrik. Selain itu, keterampilan masyarakat dalam mengurus perkebunan tebu juga menjadi bentuk positif pabrik gula Madukismo terhadap masyarakat.

Meski begitu, penelitian ini merupakan sebuah penulisan sejarah, yang memiliki "keunikan" tersendiri dibanding ilmu lainnya, yaitu dimensi temporal dan dimensi spasial. Penulisan ini menggunakan "teropong" sosial dan ekonomi pada rentang waktu 1955 sampai 1991, dan dimensi spasial yaitu pabrik gula Madukismo itu sendiri, sebagai sebuah lingkungan industri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah metode penulisan sejarah. Terdapat lima tahapan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah, yaitu pemilihan topik, heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan diakhiri dengan historiografi atau penulisan.

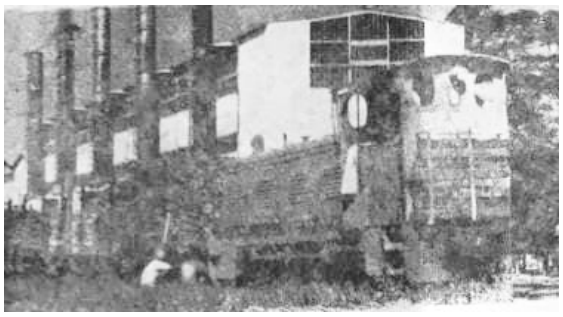
Topik dalam penulisan ini dipilih berdasar kedekatan emosional serta kedekatan intelektual. Kedekatan emosional diperoleh dari pengalaman individu maupun faktor subyektif lain yang menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, proses heuristik dalam penulisan ini dilakukan dengan membaca berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder.

Verifikasi atau kritik sumber dilakukan dengan membandingkan data antara satu sumber dengan sumber lainnya untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Data yang tidak lolos dalam tahap ini tidak akan digunakan sebagai sumber penulisan. Interpretasi dilakukan dengan memberi pandangan terhadap berbagai sumber yang telah ditetapkan. Tahpan terakhir adalah historiografi atau penulisan, dimana berbagai data akan direkonstruksi seturut konsep yang telah ditentukan.

PEMBAHASAN

Pembangunan Pabrik Gula Madukismo

Pembangunan PG. Madukismo diawali dengan penandatangan kontrak pembelian pabrik gula yang dilakukan pada awal Februari 1955 oleh Sri Sultan Hamengkubuwana IX dengan wakil kamar dagang Jerman Timur di Indonesia, Will Schild. Kontrak tersebut berisi pembelian Pabrik Gula "Padokan", seharga Rp 88.000.000, yang dibayar secara kredit dalam jangka waktu 6 tahun. (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 5 Februari 1955: 1). Jerman Timur memegang peranan penting dalam tahap pembangunan ini, dikarenakan dari teknisi yang dihadirkan, kontraktor, hingga mesin-mesin didatangkan dari Jerman Timur. Pada tahun 1956, dimulai pembangunan PG. Madukismo dengan staf sekitar 50 orang (Selo Sumardjan, 1981: 240).



Gambar 1: lori PG. Madukismo
Sumber: Suhardjendra. *Pabrik Gula lan Pabrik Spiritus Madukismo*
dalam majalah "Mekar Sari", 1 Juli 1966

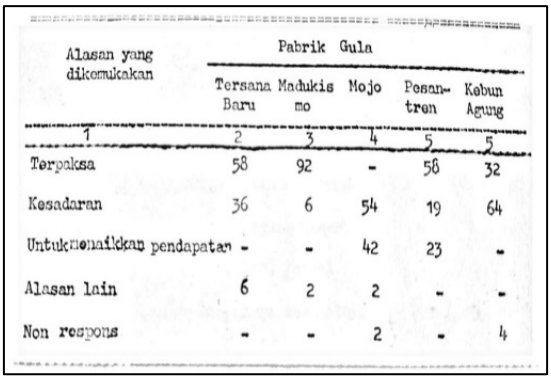
Sebelum dilakukan pemasangan mesin, terlebih dahulu para teknisi melakukan pembangunan gedung beserta rel kereta yang nantinya digunakan untuk mengangkut tebu. Oleh masyarakat sekitar, kereta tersebut dinamakan *lori*, yang penampakannya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. *Lori* ditarik oleh lokomotif dengan tenaga diesel menuju dalam pabrik, untuk kemudian tebu-tebu yang diangkut diproses menjadi gula.

Pembangunan PG. Madukismo dilakukan di atas areal PG. Padokan. Meski begitu, luas areal tersebut tidak mencukupi untuk pembangunan emplasemen. Untuk menjawab tantangan tersebut, Yayasan Kredit Tani (Yakti) berupaya untuk memperluas emplasemen PG. Madukismo. Yakti memanfaatkan 11 Ha dari areal emplasemen lama, sedangkan sisanya didapatkan dari tanah milik rakyat (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 10 Februari 1955: 2). Sumbangsih dari rakyat tersebut turut menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap akan didirikannya PG. Madukismo.

Manajemen Tanah

Industri gula di Pulau Jawa mulai berkembang semenjak ditetapkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, ketika sistem ekonomi liberal turut mendorong perputaran uang negara. Kemajuan tersebut terlihat pada perluasan tanah, dimana pada tahun 1870 luas tanah di Pulau Jawa yang ditanami gula seluas 54.176 bahu, pada 1900 naik menjadi 128.301 bahu, pada tahun 1900 meningkat menjadi 128.301 bahu, disandingi dengan peningkatan produksi gula. (Masyrullahushomad Sudrajat, *Jurnal Historia,* Volume 7 (2), 2019: 169).

Industri gula tidak terlepas dari penyediaan tanah sebagai lahan perkebunan. Realita tersebut membuat dinamika industri sangat bergantung kepada masyarakat, dalam upaya mencukupi kebutuhan tanah. Sistem dimana rakyat memiliki kuasa atas tanahnya, serta bertanggung jawab penuh akan perkebunannya sendiri dinamakan sistem "Tebu Rakyat". Dalam sistem tebu rakyat, petani menanami tanahnya sendiri dengan tebu untuk kemudian dijual hasilnya kepada pabrik gula, disamping itu petani juga dapat menggilingkan tebunya dengan membayar ongkos giling pada pabrik gula (Mubyarto, *dkk,* 1968: 40). Sistem tebu rakyat sendiri telah digunakan oleh petani di PG. Madukismo semenjak masa awal pembangunan, yakni tahun 1955. Sistem tersebut mulai dibicarakan dalam sebuah rapat DPD yang dipimpin oleh Sri Paku Alam, serta dihadiri kepala-kepala djawatan. (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 30 April 1955: 2).



Alasan yang dikemukakan	Pabrik Gula				
	Tersana Baru	Madukismo	Mojo	Pesantren	Kebun Agung
1	2	3	4	5	5
Terpaksa	58	92	-	58	32
Kesadaran	36	6	54	19	64
Untuk menaikkan pendapatan	-	-	42	23	-
Alasan lain	6	2	2	-	-
Non respons	-	-	2	-	4

Gambar 2: Alasan Penyerahan Tanah oleh Petani
Sumber: Survey Agro-Ekonomi Indonesia tahun 1968

Tabel di atas menyajikan tanggapan petani atas penyerahan tanah kepada pabrik gula, yang terdiri dari PG. Tersana Baru, PG. Madukismo, PG. Mojo, PG. Pesantren, dan PG. Kebun Agung. Untuk wilayah PG. Madukismo sendiri, dari 100 petani yang disurvey, sebanyak 92 petani memberikan tanahnya secara terpaksa, sedangkan hanya ada 6 petani menyerahkan tanahnya karena kesadaran pribadi. Angka tersebut menunjukkan diperlukannya sistem sewa tanah yang membawa dampak positif bagi kehidupan petani, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Penerapan sistem tanah rakyat di kawasan PG. Madukismo nampak pada saat diberlakukannya program Tebu Rakyat Intensifikasi pada masa Orde Baru. Program TRI mendorong agar seluruh penanaman tebu dimulai dari penanaman serta perawatan, diusahakan oleh rakyat, sedangkan pabrik berposisi sebagai "buruh giling" yang menerima tebu, lalu memproduksinya menjadi gula.

PG. Madukismo dalam Masa Awal TRI

Pada tahun 1970, terjadi embargo ekonomi terhadap negara pemasok gula berskala internasional, juga melambungnya harga gula yang disebabkan oleh kegagalan panen bahan utama produksi gula di Eropa Timur dan Rusia. Maka dari itu, demi menyelamatkan industri gula dalam negeri, pemerintah memberi kekuasaan kepada petani atas lahan perkebunan tebu untuk dirawat secara intensif, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi gula. Program tersebut ialah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Dasar hukum dari program tersebut adalah Instruksi Presiden (Inpres) no. 9/1975.

Dalam sistem TRI, rakyat mempunyai posisi sebagai tuan atas tanahnya sendiri, sedangkan pabrik gula sebagai pembimbing atas pengupayaan tanaman tebu, menyediakan bibit unggul, serta pemenuhan sarana produksi petani. Sistem tersebut dinamakan sebagai Bimbingan Masal (Bimas).

Penerapan sistem TRI pada masa awal di pabrik gula Madukismo dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama, areal tanaman TRI masih berada di bawah luas areal tebu pabrik, dikarenakan para petani merasa masih belum mampu dan siap untuk menjalani program tersebut (Nurdiyanto, 1993/1994: 117). Kurangnya pengetahuan terhadap teknologi pengolahan tebu industrial melahirkan masalah tersendiri bagi petani, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi hal tersebu, salah satunya adalah kursus bagi petani. Pada tahun 1976, diadakan kursus bagi kelompok tani dan kontak tani se kabupaten Bantul yang dilaksanakan selama 3 hari,

guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani terkait Tebu Rakyat Intensifikasi. Pada tahun yang sama juga dilakukan penataran terhadap 40 petani TRI di aula PT. Madu Baru, yang dibuka oleh kepala dinas pertanian DIY, Ir. Sutrisno, dengan pengajar dari Bapem DIY, Pemda Kabupaten, BRI, BP3D, LPP, serta para teknisi dari PG. Madukismo (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 14 Agustus 1976: 2). Proses penataran juga dilakukan terhadap sinder PG. Madukismo, yang nantinya akan turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan petani.

Petani dihadapkan pada sistem yang berbeda dari sebelumnya, yang mana pengelolaan tebu menjadi tanggung jawab pabrik. Masalah tersebut membuat areal tebu PG. Madukismo pada tahun pertama prpgam TRI, masih berada dalam luas areal tebu pabrik. Pada tahun 1976, yang notabene merupakan masa awal TRI, PG. Madukismo berhasil menggiling tebu TRI seluas 1.863, 72 ha, sedangkan untuk tahun 1977 meningkat menjadi 2.350, 79 ha. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan dari sinergitas antara masyarakat dengan pabrik gula Madukismo dalam mengawali proses TRI.

Dari Rakyat, untuk Rakyat

Keberhasilan jalannya TRI tidak luput dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa, yang dikoordinasi dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Sampai dengan musim giling tahun 1975-1976, terdapat sejumlah 15 KUD di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan program TRI (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 12 April 1977: 2). KUD juga menjadi penghubung antara petani desa dengan pemerintah, seperti permohonan sarana produksi bagi petani. Tugas tersebut nampak pada tahun 1978, dimana KUD Sewon mengajukan paket pemberantasan hama Rp 20.000 per Ha (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 27 Januari 1978: 2).

Peran KUD sebagai pengelola TRI setiap desa mengharuskan hubungan KUD dengan petani berjalan baik, dikarenakan komunikasi yang kurang baik akan menghambat dinamika petani dalam mengelola tebu, hingga berujung pada kerugian. Hal tersbut seperti yang dialami oleh KUD "Tani Bhakti", Sewon. Pada musim tanam 1981-1982, kalurahan setempat terlambat dalam pendaftaran areal tanah ke KUD, serta kurangnya perhatian terhadap keamanan tebu, yang oleh KUD, kesalahan tersebut dilimpahkan kepada petani (Koran *Kedaulatan Rakyat*¸2 April 1983: 3). Sementara itu, kemajuan justru dialami oleh KUD Taniharjo, Pandak, dimana kesadaran petani untuk turut berpartisipasi dalam program TRI tumbuh kembali, setelah sebelumnya enggan menyerahkan sawahnya untuk ditanami tebu (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 6 Juni 1985: 3).



Gambar 3: Petani penggarap TRI di Ngimbang, Pendowoharjo, Sewon berdialog dengan sinder
Sumber: Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 15 November 1977, hal. 2.

Pengupayaan tebu yang dilakukan oleh petani dibimbing oleh penyuluh pertanian yang dinamakan sebagai sinder. Dalam pekerjaannya, sinder turun ke lapangan untuk memandu petani dalam melakukan tugasnya di kebun tebu agar petani dapat melaksanakan perannya dengan baik. Pada tahun 1977, sejumlah 32 sinder pabrik ula se-Jawa yang sedang menempuh kursus sinder tebu tanam di Lembaga Pendidikan Yogya meninjau tebu rakyat di daerah Sewon.

Dialog dilakukan antara sinder terhadap petani, untuk menemukan kebutuhan yang diperlukan petani dalam kaitannya dengan perawatan tebu. Karena pada umumnya, petani kurang mampu menggarap tanahnya untuk ditanami tebu, maka akan dicarikan tenaga kerja dari daerah lain untuk menggarap sekitar 50% tanah petani Sewon agar cepat membuahkan hasil (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 15 November 1977).

Program TRI berjalan dengan memanfaatkan tebu rakyat sebagai bahan baku produksi gula. Demi mencukupi kebutuhan lahan, para petani pada setiap desa menyewaan tanahnya kepada pabrik gula untuk kemudian digiling menjadi gula. Di samping itu, pabrik gula juga menyediakan paket perawatan tebu yang akan disalurkan melalui KUD. Semakin baik kualitas tebu maka rendemen yang didapat akan semakin tinggi, dan tingginya rendemen akan meningkatkan pendapatan petani.

Gambar di atas menampilkan para petani Godean yang sedang menunggu penyerahan gula pasir, sebagai bentuk sewa tanah keoada PG. Madukismo pada tahun 1978, yang bertempat di kantor kelurahan. Dari PG. Madukismo, petani akan menerima berbagai upah sebagai berikut:

1. **Sewa tanah**: imbalan berupa 17 ½ kw gula pasir per ha, yang diberikan secara bertahap.
2. **Bagi hasil**: imbalan berupa gula pasir sebanyak 30 pct, dan 70 pct sisanya menjadi milik pabrik yang diberikan kepada petani bila berhasil mendapat lebih dari 30 kw tebu.



Gambar 4: Petani-petani Godean yang sedang menunggu penyerahan gula sebagai ganti sewa tanah kepada PG. Madukismo
Sumber: Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 31 Januari 1978, hal. 2.

3. **Dongkelan**: imbalan berupa ½ kwintal gula pasir setiap hektar.
4. **Ajon-ajon**: imbalan yang diberikan kepada petani apabila tebu dapat ditebang lebih awal. Semakin "maju" dari rentang waktu tebangan maka semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan petani. Jika maju pada bulan Maret akan menerima Rp. 15. 000, April Rp 9. 000, Mei semakin menurun, sedangkan Juni tidak menerima ajon-ajon (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 31 Januari 1978).

Pendapatan tertinggi petani PG. Madukismo terjadi tahun 1991. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur P2G Madubaru PT, Drs. KRT Madudiningrat dalam sambutannya saat selamatan giling tahun 1992. Pada tahun 1990, pendapatan petani sebesar Rp.

1.207.800, kemudian meningkat menjadi Rp 2.504.000 pada tahun 1991 (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 21 April 1992: 8).

"Babak Baru" PG. Madukismo

Dinamika pabrik gula Madukismo dengan rakyat tidak berjalan dengan mulus. Dalam masa TRI, tebu yang masuk pabrik kerap kali kelebihan muatan hingga tidak tergiling dan kadang-kadang kurang muatan, sehingga terpaksa pabrik berhenti giling (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 5 Januari 1982: 3). Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1984, masalah penebangan hingga pengangkutan tebu yang tadinya menjadi kewajiban KUD, dialihkan menjadi tanggung jawab pabrik.

Hambatan yang terjadi berpengaruh pada jumlah produksi gula. Pada tahun 1983, jumlah tebu hanya mencapai 5424 Kwt saja dari total 15.000 Kwt untuk digiling. Apabila giling tersebut tersendat-sendat karena tebu terlambat masuk namun mesin tetap berjalan, PG. Madukismo akan rugi setiap harinya sebanyak Rp 1,5 juta, itu pun belum upah karyawan (Koran *Kedaulatan Rakyat,* Kamis 28 April 1983: 3). Pada tahun 1984, PG. Madukismo sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung berbagai beban tersebut sendirian, sehinggan pada 4 Maret 1984, Sri Sultan menandatangani kontrak kerja dengan direktur utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), yang akan mengelola PG. Madukismo.

Semenjak PG. Madukismo "terselamatkan" dari bencana kerugian, maka dilakukanlah berbagai upaya untuk membenahi segala faktor kerugian, dimulai dari perubahan formasi kepengurusan PG Madukismo, diantaranya H. KGPH Mangkubumi SH diangkat menjadi Presiden Komisaris menggantikan Sultan HB. IX. Sedangkan pada posisi komisaris sendiri, Sri Paku Alam VIII dan Ir. Sutris Sumarto digantikan oleh Drs. Mursono Siswoharjono (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 4 April 1984: 1). Sedangkan pada tingkat desa, dalam KUD Sewon juga terjadi perombakan kepengurusan, dimana pengurus KUD Sewon yang baru dianggap lebih kreatif dan berani mengutarakan pendapat, sedangkan pengurus yang lama bahkan tidak dapat menuntaskan tanggung jawabnya (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 2 Mei 1985: 3).

Daerah PG.	Jumlah Responden	Peg. Negeri/ Buruh	Pedagang	Lain lain	Tak ada nomor bilan	Non Responden
1	2	3	4	5	6	7
Terasan Baru	50	6	16	10	68	-
Madukismo	50	4	18	10	66	-
K o j o	50	14	14	-	42	30
Pucantren	43	2	19	7	70	2
Keban Agung	50	8	14	16	56	6

Gambar 5: Pekerjaan Sampingan Petani di Luar Sektor Pertanian
Sumber: Survey Agro-Ekonomi Indonesia 1968

Pengaruh positif juga nampak dari meningkatnya faktor keamanan dalam distribusi tebu. Pada tahun 1988 sampai 1990 kerap ditemukan truk angkutan tebu yang nyelonong dari wilayah DIY masuk ke Klaten. Para pedagang tebu yang menjual tebunya ke Klaten tersebut tidak mau menaati aturan jadwal tebang, sehingga hanya memburu untungnya sendiri (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 6 Juni 1991: 3). Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1987 PG. Madukismo

menempatkan petugas di perbatasan DIY-Jateng untuk menghalau truk yang keluar jalur (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 20 April 1987: 3). Pada tahun 1991, kasus tersebut mulai mereda, dimana jumlah truk yang keluar jalur sudah tidak sebanyak tahun sebelumnya.

Pengaruh PG. Madukismo Terhadap Masyarakat

Kehadiran PG. Madukismo di tengah masyarakat dimaksudkan oleh Sultan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat yang terpuruk karena masa perang kemerdekaan, terlebih karena di daerah Yogyakarta sendiri terdapat sejumlah 2.815 buruh gula non aktif (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 20 Januari 1955: 2). Kehadiran PG. Madukismo seakan menjadi "angin segar" bagi para buruh gula non aktif tersebut, yang mana telah kehilangan pekerjaannya akibat siasat "Bumi Hangus" pada masa perang revolusi.

Data di atas menampilkan sebanyak 68 petani di PG. Madukismo tidak memiliki pekerjaan sampingan, sedangkan 14 petani memiliki sampingan sebagai buruh dan 18 sebagai pedagang. Angka tersebut menunjukkan bahwa perkebunan tebu, sekaligus PG. Madukismo menjadi "pilar" utama penghasilan para petani.

Dampak positif yang diberikan PG. Madukismo, terutama sebagai lapangan pekerjaan ialah seluas persebaran lahan yang digunakan untuk kebun tebu, dikarenakan petani kebun tebu juga merupakan bagian dari lapangan pekerjaan para petani. Segala penghasilan yang didapat bergantung penuh pada tanah, apalagi dengan melihat gambar sebelumnya yang menunjukkan bahwa kebun tebu menjadi harapan utama petani, untuk bekerja. Perkebunan PG. Madukismo sendiri tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun paling banyak terletak di kabupaten Bantul dan Sleman.

PG. Madukismo membawa pengaruh sosial, bagi masyarakat, salah satu gejala sosial yang juga muncul ialah patologi sosial. Secara etimologis, patologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *pathos* yang berarti emosi, gairah maupun menderita, sedangkan *ology* yang berarti ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa patologi sosial merupakan ilmu penyakit (Suyanto, 2016: 3). Penyakit yang dimaksudkan bukanlah gangguan kesehatan biologis, namun kebiasaan yang melenceng dari norma masyarakat. Salah satu aksi yang kerap dilakukan masyarakat di lingkungan PG. Madukismo adalah pencurian. Areal perkebunan merupakan bagian dari pabrik gula yang banyak ditumbuhi tebu. Tanaman tersebut seringkali menjadi sasaran. Tindakan tersebut berdampak buruk bagi hasil produksi gula. Pada tahun 1970, PG. Madukismo mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 akibat sebanyak 3,7 % atau 74 ha tebu di sawah hilang dicuri (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 13 Oktober 1970: 2).

Nuansa jalan yang berada di tengah tengah perkebunan tebu atau biasa disebut *bulak* menjadi ruang bagi penyakit sosial yang berikutnya, yaitu premanisme. Hal tersebut disebabkan karena nuansa *bulak* yang minim akan pengamatan masyarakat. Salah satu dari aksi tersebut terjadi pada tahun 1985, dimana karyawan PG. Madukismo yang mendapat tugas malam dicegat oleh empat pemuda, dan korban turun dari sepedanya. Sesaat setelahnya, kawanan tersebut lantas menodongkan sebilah pisau, lalu merampas uang senilai Rp. 5000 dari saku celana korban (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 29 Mei 1985: 3).



Gambar 6: Karnaval Tebu Manten tahun 1988
Sumber: Koran *Kedaulatan Rakyat*, 14 April 1988, hal. 3.

Fenomena penyakit sosial yang terakhir adalah korupsi. Pada tahun 1961, Dr. Hadiprabowo selaku direktur PG. Madukismo dinyatakan bersalah oleh hakim, dalam persidangan di pengadilan Negeri Yogyakarta dengan menyalahgunakan kedudukan untuk memperkaya diri sendiri, serta memicu kerugian bagi PG. Madukismo sejumlah Rp 3.467.338,86. Atas Tindakan tersebut, Dr. Hadiprabowo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, serta perampasan sebuah mobil dan perhisasan untuk mengurangi kerugan yang diderita pabrik (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 25 November 1961: 2). Kasus korupsi juga terjadi di tingkat desa. Pada tahun 1989, KUD Gamping melakukan manipulasi uang senilai 122 juta (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 28 April 1989, hlm. 3).

Cembengan

Dinamika PG. Madukismo membawa kembali tradisi yang telah hilang seturut hancurnya berbagai pabrik gula pada masa awal, bernama cembengan. Tradisi tersebut terbagi dalam rangkaian kegiatan guna menyambut musim giling yang akan dihadapi, mulai dari pagelaran wayang, karnaval tebu manten, hiburan malam, dan pemberian sesaji pada tempat-tempat tertentu. Karnaval tebu manten menjadi puncak dari perayaan cembengan. Warga dari berbagai desa di sekitar PG. Madukismo turut berjalan, mengitari pabrik sembari mempersembahkan penampilan dari masing-masing desa, mengiringi "sepasang tebu" yang akan "dinikahkan". Pernikahan tersebut mremiliki makna sebagai sebuah bentuk kerja sama yang baik antara perusahaan dengan petani tebu (Resna Trimerani, *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 11, no. 2, 2020: 203).

Bentuk dari cembengan PG. Madukismo mulai terlihat setelah peresmian pabrik, khususnya pada tahun 1959, dalam rupa tradisi *slametan*[1]. Tradisi tersebut dilakukan secara internal oleh kaum pabrik untuk menyambut musim giling yang akan datang. Mesin giling yang terus beroperasi sempat terhenti karena lumpur, namun dapat dibersihkan sehingga kemudian dapat beroperasi lagi. Percobaan giling terus dilakukan, hingga akhirnya proses giling PG. Madukismo telah berhasil mengeluarkan gula putih (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 1959: 2).

Tradisi *slametan* dalam cembengan dilakukan dengan memberikan persembahan berupa makanan, kepada tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral. Hal tersebut terlihat pada tahun

[1] Menurut Bakker (1964) dalam leksikon *Giri Sonta Course for Javanese* #286, *slametan* merupakan persembahan korban dalam wujud makanan.

1986 dan 1987, dimana dilakukan pemberian sesaji di makam Mojopahit, makam Rogocolo[2], serta pompa air Jogonalan (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 12 April 1986: 3).

Gambar di atas menampilkan karnaval Tebu Manten pada cembengan tahun 1988. Tampak masyarakat berjejeran di pinggir jalan, dan menyaksikan sepasang tebu yang sedang diarak. Sepasang tebu tersebut berada di dalam dokar yang berjalan dengan tenaga seekor kuda. Selain pihak dalam pabrik, peserta karnaval juga terdiri dari perwakilan masyarakat dalam setiap desa.

Tradisi cembengan mengandung berbagai makna implisit di dalamnya. Harapan akan kesuksesan PG. Madukismo terlihat pada cembengan tahun 1992, dimana menurut Sri Sultan HB X yang saat itu hadir, pabrik gula hendaknya dipelihara dengan semangat saling memiliki, agar lestari sebagai wahana menyejahterakan masyarakat, terutama bagi petani (Koran *Kedaulatan Rakyat,* 21 April 1992: 8).

KESIMPULAN

"Hangus"-nya seluruh pabrik gula di Yogyakarta melahirkan tekad Sri Sultan untuk membangun kembali satu pabrik gula pengganti, yang kemudian hadir pada masa pasca kemerdekaan, yakni pabrik gula Madukismo. Realita tersebut membuat kehadiran PG. Madukismo menjadi "angin segar" bagi masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Meski begitu, peran utama dalam pembangunan PG. Madukismo berasal dari Jerman Timur, mulai dari teknisi hingga kontraktor. Selain sebagai lapangan pekerjaan, kehadiran PG. Madukismo juga dimaknai secara kultural oleh masyarakat sekitarnya, terlihat dari terbentuknya tradisi cembengan di PG. Madukismio.

Dinamika PG. Madukismo tidak lepas dari peran masyarakat sebagai petani perkebunan tebu, yang mayoritas berada di kabupaten Bantul maupun Sleman. Masa TRI mengharuskan masyarakat menjadi "ujung tombak" jalannya industri gula, meski pada awalnya mengalami hambatan dari para petani. Hambatan tersebut menimbulkan kerugian yang berujung pada pengadaan kerja sama PT. Madu Baru dengan PT. RNI. Semenjak kebijakan tersebut, PG. Madukismo dapat meneruskan kegiatan produksinya, hingga pada tahun 1991, petani mendapatkan hasil tertinggi semasa musim gilingnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mubyarto dan Daryanti. *Gula: Kajian Sosial-Ekonomi*. 1991. Yogyakarta: Aditya Media.

Mubyarto, Sutatwo Hadiwigeno, Achmad Sutarmadi, Mudjijo Prodjosiehardjo, Dibijo Prabowo, dan Djamasri Adenan, 1968. Usahatani Tebu dan Industri Gula di Jawa. Yogyakarta: Survey Agro-Ekonomi Indonesia.

Hermanu, 2019. *Suikerkultuur Jogja yang Hilang*. Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta.

Talcott Parsons, 2005. *The Social System,* Inggris: Taylor & Francis e-Library.

Selo Sumardjan, 1981. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

---

[2] Menurut RM Bintarti dalam Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 2 April 1974, hal. 2, "Rogocolo" merupakan singkatan dari "Raden Tumenggung Secodiningrat" yang dimakamkan di atas bukit desa Mrisi, selatan PG. Madukismo. RT. Secodiningrat merupakan seorang Tionghoa yang memiliki nama asli Tan Djin Sing. Ketika peristiwa Geger Sepehi, Tan Djin Sing berperan dalam penggulingan sultan HB II dengan membiayai kas HB III untuk pemeliharaan tentara Sepehi. Atas jasanya tersebut, Tan Djin Sing beroleh gelar "Raden Tumenggung Secodiningrat" dari HB III

Koran dan Jurnal

"Buruh gula non aktip sampaikan konsepsi", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 20 Januari 1955), hlm. 2.

"Kontrak pembelian paberik gula Jogja ditanda tangani", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 5 Februari 1955), hlm. 1.

"Perluasan Emplasemen PG Padokan Sampai 30 HA", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, 10 Februari 1955), hlm. 2.

"Perdjandjian Menanam Tebu Rakjat", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 30 April 1955), hlm. 2.

"Gula Madu Kismo Sudah Putih", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 30 Mei 1959), hlm. 2.

"Hadiprabowo / dihukum 5 tahun", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 25 November 1961), hlm. 2.

"PG. Madukismo rugi Rp. 30,- djuta", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 13 Oktober 1970), hlm. 2.

RM. Bintarti, "Trah Rogocolo" (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 2 April 1974), hlm. 2.

"Bantul Adakan Kursus Kelompok Tani TRI", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 14 Agustus 1976), hlm. 2.

"Kredit Tebu Rakyat Tidak Lewat KUD Lagi", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 12 April 1977), hlm. 2.

"32 Sinder PG Se Jawa Tinjau Tebu Rakyat Bantul", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 15 November 1977), hlm. 2.

"Melalui DPRD DIY: KUD Sewon Mengharapkan Pemerintah Menurunkan Pajak Gula Petani TRI", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Jumat 27 Januari 1978), hlm. 2.

"Petani Godean Terima Gulapasir Sebagai Sewa Tanah untuk PG", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 31 Januari 1978), hlm. 2.

"Tidak Benar Madukismo Copot 400 Karyawan. Yang Benar: Ada Mutasi dan Reorganisasi", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 5 Januari 1982), hlm. 3.

"Petani Bantul Berharap TRI Tahun Ini Lebih Baik", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 2 April 1983), hlm. 3.

"PG Madukismo Berhenti Giling karena Masuknya Tebu Seret", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 28 April 1983), hlm. 3.

"PG Madukismo tak boleh tutup walaupun keadaannya gawat", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Rabu 4 April 1984), hlm. 1.

"Kerugian KUD Sewon, Bantul karena beban pengurus lama", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 2 Mei 1985), hlm. 3.

"Begal beraksi lagi di Kasihan korbannya karyawan Madukismo", (Koran 14a Rakyat, Rabu 29 Mei 1985), hlm. 3.

"Petani Pandak bersedia Kembali berpartisipasi pada program TRI", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 6 Juni 1985), hlm. 3.

"Selamatan Giling PG Madukismo Dimulai 17 April di Parangkusumo", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 12 April 1986), hlm. 3.

"Untuk Atasi Pelarian Tebu: PG Madukismo Perketat Penjagaan di Perbatasan Jateng-DIY", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Senin 20 April 1987), hlm. 3.

"Cembengan PG Madukismo", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 14 April 1988), hlm. 3.

"Kendati tidak Diperbolehkan Uang TRI Digunakan oleh KUD", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Jumat 28 April 1989), hlm. 3.

"Larinya Tebu ke Luar DIY Tak Sebanyak Tahun Lalu", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Kamis 6 Juni 1991), hlm. 3.

"Sri Sultan HB X: Pabrik Gula untuk Kepentingan Masyarakat", (Koran *Kedaulatan Rakyat*, Selasa 21 April 1992), hlm. 8.

Masyrullahushomad Sudrajat, 2019. Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan di Pulau Jawa. Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Volume 7 (2)

Resna Trimerani, Tradisi Selamatan Cembengan dalam Mewujudkan Keteraturan Sosial (Studi Deskriptif di PG-PS Madukismo). Jurnal "Sosial Humaniora" vol. 11, no. 2, Oktober 2020.